Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi VII
Minggu ke-2 Mei
(5 s.d. 11 Mei 2025)
2025

BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging research to parliament
Evidence based policy making

MEWUJUDKAN PARIWISATA INKLUSIF BAGI TUNA RUNGU DI INDONESIA

Fadila Puti Lenggo Geni
Analis Legislatif Ahli Pertama
fadila.geni@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Berbagai inisiatif pengembangan pariwisata inklusif bagi penyandang disabilitas tuna rungu kini tengah digalakkan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk di Tasikmalaya. Komunitas Metamorfrosa bersama para relawan muda berperan sebagai pelopor dalam menghadirkan aksesibilitas wisata yang ramah bagi teman tuli melalui implementasi program-program khusus. Program tersebut mencakup pelatihan bahasa isyarat bagi para pelaku industri pariwisata, pengembangan media informasi berbasis visual, serta penyusunan standar pelayanan yang mendukung kebutuhan pengunjung dengan disabilitas. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pariwisata yang benar-benar inklusif, di mana teman tuli dapat menikmati pengalaman wisata tanpa menghadapi hambatan komunikasi. Inisiatif ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memperoleh apresiasi luas karena menempatkan teman tuli tidak semata-mata sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai agen perubahan dalam sistem pariwisata. Kolaborasi antara komunitas, pemerintah daerah, serta pelaku industri pariwisata menjadi faktor kunci dalam membangun ekosistem pariwisata yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pariwisata dapat menjadi sarana pemberdayaan sosial khususnya bagi kelompok rentan.

Upaya serupa juga tengah dikembangkan di Labuan Bajo, Flores, melalui pelatihan bagi para pelaku wisata guna menghadirkan layanan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Pemerintah daerah bersama sektor swasta mulai merumuskan kebijakan serta membangun infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, termasuk penyediaan pemandu wisata yang menguasai bahasa isyarat dan fasilitas penunjang lainnya. Langkah ini mencerminkan komitmen nasional dalam mewujudkan pariwisata yang benar-benar merangkul seluruh lapisan masyarakat. Inisiatif yang berlangsung di Tasikmalaya dan Labuan Bajo menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam pengelolaan pariwisata di Indonesia, dari pendekatan yang cenderung eksklusif menuju model yang lebih inklusif, adil, dan setara. Selain memperluas akses terhadap sektor pariwisata, pendekatan ini juga memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, mengedepankan keberagaman, dan membuka peluang ekonomi baru yang inklusif dan partisipatif. Semangat inklusivitas juga tercermin dalam sektor kuliner, salah satunya melalui kehadiran kafe ramah disabilitas seperti Sunyi Coffee House. Kafe ini menjadi ruang aman dan terakses bagi penyandang disabilitas tuna rungu, dengan seluruh baristanya merupakan teman tuli. Pengunjung diajak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat atau melalui kartu percakapan yang tersedia, menciptakan suasana interaksi yang inklusif sekaligus edukatif. Inisiatif semacam ini tidak hanya memperkuat ekosistem sosial yang lebih setara, tetapi juga menjadi bukti bahwa prinsip inklusivitas dapat diterapkan secara nyata di berbagai sektor kehidupan, termasuk industri kuliner.

Gagasan ini layak untuk diimplementasikan secara luas di seluruh wilayah Indonesia dengan mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, komunitas disabilitas, serta institusi pendidikan dan pelatihan. Prinsip inklusivitas perlu diintegrasikan ke dalam standar pelayanan pariwisata nasional, antara lain melalui program pelatihan bahasa

isyarat bagi tenaga kerja di sektor pariwisata dan kuliner. Selain itu, dukungan nyata juga dapat diwujudkan dalam bentuk insentif bagi pelaku usaha yang menyediakan fasilitas ramah disabilitas, baik dari segi infrastruktur maupun kualitas pelayanan, guna menciptakan lingkungan pariwisata yang benar-benar inklusif dan berdaya guna bagi semua kalangan. Inisiatif yang telah dijalankan di Tasikmalaya dan Sunyi Coffee House dapat dijadikan model inspiratif yang layak direplikasi di berbagai daerah lain, dengan tetap mempertimbangkan dan menyesuaikan pada kearifan lokal masing-masing. Salah satu contohnya adalah pengembangan UMKM kuliner di kawasan wisata yang melibatkan teman tuli sebagai barista atau staf layanan, sekaligus mendorong pelatihan komunikasi inklusif bagi masyarakat setempat. Dalam hal ini, lembaga pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan keterampilan untuk melayani pengunjung dengan disabilitas secara profesional dan empatik.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital berpotensi besar dalam mendukung pariwisata inklusif melalui penyediaan panduan wisata yang bersifat visual dan mudah diakses, baik dalam bentuk aplikasi maupun situs resmi yang dirancang khusus agar ramah bagi penyandang disabilitas. Dalam jangka panjang, pengembangan sistem pendataan yang terintegrasi mengenai kondisi aksesibilitas di sektor pariwisata akan menjadi landasan penting dalam proses evaluasi dan penyusunan kebijakan yang lebih responsif. Apabila diterapkan secara konsisten dan menyeluruh, pendekatan ini diyakini dapat membentuk lanskap pariwisata Indonesia yang lebih manusiawi, adil, dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

Atensi DPR

DPR RI khususnya Komisi VII, perlu memberikan perhatian serius terhadap berkembangnya inisiatif pariwisata inklusif bagi penyandang disabilitas tuna rungu di berbagai daerah. Dalam menjalankan fungsi legislasi, Komisi VII DPR RI dapat mendorong lahirnya regulasi yang mewajibkan penerapan standar layanan inklusif di sektor pariwisata dan kuliner, termasuk kewajiban pelatihan bahasa isyarat bagi para pelaku usaha. Dari aspek pengawasan, penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan oleh Kementerian Pariwisata benar-benar mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Sementara dalam fungsi penganggaran, Komisi VII DPR RI dapat menginisiasi alokasi dana khusus yang ditujukan untuk pelatihan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas, serta digitalisasi informasi wisata yang aksesibel. Dukungan ini akan menjadi langkah strategis dalam mengarusutamakan prinsip inklusivitas dalam pembangunan pariwisata nasional yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan.

Sumber

detik.com, 6 Mei 2025;
kabartasikmalaya.pikiran-rakyat.com, 5 Mei 2025;
popbela.com, 9 Mei 2025;
timesindonesia.co.id, 3 Mei 2025; dan
wartaekonomi.co.id, 21 Oktober 2024.

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR
Polhukam Ahmad Budiman, Prayudi, Rachmi Suprihartanti S., Novianti
Ekkuinbang Sri Nurhayati Q., Mandala Harefa, Ari Mulianta Ginting, Eka Budiyanti, Venti Eka Satya, Teddy Prasetiawan
Kesra Trias Palupi K., Luthvi Febryka Nola, Yulia Indahri

LAYOUTER
Devindra Ramkas O., Ully Ngesti Pratiwi, Desty Bulandari, Yustina Sari, Masyithah Aulia A., Ulayya Sarfina, Yosephus Mainake, M. Z. Emir Zanggi, Muhammad Insan F., Audry Amaradyaputri, Timothy Joseph S. G., Nur Sholikah P. S., Fieka Nurul Arifa

https://pusaka.dpr.go.id @pusaka_bkdprri
©PusakaBK2025
Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making